

PETA MUTU PENDIDIKAN

JENJANG SMP KABUPATEN BADUNG

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

Oleh :

Ni Wayan Murki, S.Pd., MM.
I Wayan Pasta, S.Pd., M.Pd.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BALI
2019**

PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP KABUPATEN BADUNG

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

ISBN : 978-623-7441-00-7

Penulis :

Ni Wayan Murki, S.Pd., MM.

I Wayan Pasta, S.Pd., M.Pd.

Editor :

I Made Alit Dwitama, ST, M.Pd.

Desain Sampul :

Heru Susanto

Tata Letak :

Gus Ryan

Penerbit :

LPMP BALI

Anggota IKAPI No. 018/BAI/16

Redaksi:

Jl. Letda Tantular No. 14 Niti Mandala Denpasar 80234

Telp. 0361 225666, Fax. 0361 246682

Pos-el : lpmpbali@kemdikbud.go.id

Laman : lpmpbali.kemdikbud.go.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Badung dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Saya menyambut baik dengan adanya peta capaian mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Badung, sehingga dapat dijadikan dasar oleh pemerintah Kabupaten Badung dalam peningkatan mutu pendidikan jenjang SMP. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, yang telah berpartisipasi dalam penyusunan peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Badung.
2. TPMPD Kabupaten Badung yang telah bekerja keras mewujudkan capaian peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Badung.
3. Widyaiswara LPMP Bali yang telah berkontribusi secara akademis dalam pembuatan peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Badung.

Peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Badung, dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Badung.



Kepala LPMP Bali,

I Made Alit Dwitama, S.T., M.Pd.

NIP 19741225 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Acuan Formal dan Nonformal.....	3
C. Tujuan.....	3
D. Manfaat.....	3

BAB II PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

A. Mutu Pendidikan.....	4
B. Indikator Mutu Pendidikan.....	6
C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan.....	9
D. Sumber Data Peta Capaian SNP.....	19
E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP.....	19

BAB III HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SMP KABUPATEN BADUNG

A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018	20
B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan.....	24
C. Analisis Capaian Standar Isi	26
D. Analisis Capaian Standar Proses	29
E. Analisis Capaian Standar Penilaian.....	31
F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	33
G. Analisis Capaian Standar Sarana dan Prasarana.....	38
H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan	38
I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan.....	39
J. Identifikasi Masalah Dalam Penyusunan Peta Mutu Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018.....	41
K. Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan	50

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	55
B. Rekomendasi	55

DAFTAR PUSTAKA	56
----------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.....	7
Gambar 2.2	Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan Internal (SPMI)	8
Gambar 2.3	Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP	9
Gambar 3.2	Capaian Rapor Mutu Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018	22
Gambar 3.3	Grafik radar capaian mutu SNP jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen.....	10
Tabel 3.1	Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018.....	20
Tabel 3.2	Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018	21
Tabel 3.3	Data Responden pada Rapor Mutu Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018.....	21
Tabel 3.4	Capaian SNP pada Level Tertentu pada Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018.....	22
Tabel 3.5	Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018	23
Tabel 3.6	Capaian SKL Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018	24
Tabel 3.7	Capaian Standar Isi Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018	26
Tabel 3.8	Capaian Standar Proses Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018	29
Tabel 3.9	Capaian Standar Penilaian Jenjang SMP Provinsi Bali Tahun 2018	31
Tabel 3.10	Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018.....	34
Tabel 3.11	Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018.....	38
Tabel 3.12	Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018.....	39
Tabel 3.13	Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018.....	40
Tabel 3.14	Identifikasi Masalah Dalam Penyusunan Peta Mutu Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018.....	41
Tabel.3.15	Verifikasi dan Validasi Data Mutu Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diamanatkan bahwa setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (*whole school approach*). Sebagai langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan penyusunan peta mutu. Penyusunan peta mutu ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan

akurat dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai base-line data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Sekolah/Madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Salah satu alat untuk mengkaji kemajuan peningkatan mutu sekolah secara komprehensif yang berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS sebagai salah satu komponen SPMP diharapkan dapat membangun semangat dan kultu penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hasil pemetaan mutu pendidikan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk dapat menghasilkan peta mutu dan rekomendasi program peningkatan mutu yang tepat sebagai upaya pemenuhan 8 (delapan) SNP di tingkat sekolah. Berbagai rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pemetaan mutu pendidikan kemudian perlu dituangkan ke dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS), untuk jangka waktu menengah, dan RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) yang merupakan jangka pendek setiap tahun. Pemetaan mutu pendidikan diverifikasi oleh Pengawas Sekolah selaku pembina sekolah tersebut. Kegiatan agregasi dan analisis pemetaan mutu pendidikan dilakukan untuk mendapatkan peta tentang capaian 8 (delapan) SNP. Dari hasil analisis ini akan didapat gambaran tentang tahapan pengembangan setiap indikator dari setiap SNP untuk setiap jenjang pendidikan. Analisis ini akan menghasilkan peta mutu dan berbagai rekomendasi yang akurat dan bermanfaat bagi pemerintah kota/kabupaten/ provinsi untuk dasar perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kota/kabupaten/ provinsi yang perlu dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Agregasi data pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian strategi yang dilaksanakan oleh tim penjaminan mutu pendidikan daerah/pengawas sekolah tingkat Pemerintah Daerah untuk memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektifan sekolah dan tenaga kependidikan berdasarkan SNP. Hasil agregasi ini menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah kabupaten/kota/ provinsi sesuai kewenangannya untuk dapat dipahami dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga menjadi suatu budaya mutu di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat pusat. Hal ini sesuai dengan peran Pemerintah Daerah baik Kabupaten maupun Kota dan Provinsi dalam Sistem Pendidikan Nasional, dalam hal: (1) menyediakan pelayanan pendidikan; (2) memonitor mutu pendidikan dan pelayanan pendukung pendidikan; (3) membuat laporan mengenai mutu dan kinerja sekolah; dan (4) meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan. Peta mutu pendidikan ini memaparkan peta capaian mutu SNP Kabupaten Badung untuk setiap jenjang pendidikan. Peta capaian mutu SNP dibuat sebagai perwujudan tugas dan wewenang LPMP Bali dalam memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat Kabupaten Badung.

B. Acuan Formal dan Nonformal

Peta mutu pendidikan Kabupaten Badung didasari oleh dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya analisis peta mutu pendidikan (capaian Standar Nasional Pendidikan) Kabupaten Badung adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu pendidikan Kabupaten Badung serta analisisnya, dan untuk menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat Kabupaten Badung berdasarkan pemetaan mutu pendidikan dengan harapan dapat mendorong satuan pendidikan maupun pemerintah daerah mengimplementasikan SPMP dengan baik dan berkelanjutan.

D. Manfaat

Pada akhirnya nanti, analisis peta capaian mutu SNP ini diharapkan dapat menjadi baseline pelaksanaan SPMP sebagai elemen esensial peningkatan mutu pendidikan sehingga SPMP dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016.

BAB II

PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

A. Mutu Pendidikan

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif dan psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah serta dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah dan manajemen kelas berfungsi untuk mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antar guru, siswa dan sarana pendukung di kelas.

Satori (2016) menyatakan bahwa mutu pendidikan adalah nilai dan manfaat yang sesuai dengan standar nasional pendidikan atas input, proses, output, dan outcome pendidikan yang dirasakan oleh pemakai jasa pendidikan dan pengguna hasil pendidikan. Memahami pengertian tentang mutu pendidikan selalu mengedepankan keadaan dan hasil pendidikan yang berada di masyarakat seperti Danim (2002) berpendapat bahwa kualitas pendidikan dilihat dari hasil pendidikan dianggap bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. Di luar kerangka itu mutu keluaran juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh peserta didik selama mengikuti pendidikan. Djaali (2014) secara spesifik menyatakan bahwa ukuran mutu pendidikan adalah (1) kompetensi lulusan yang dinyatakan dengan pencapaian kompetensi dasar esensial minimal; (2)

kualitas proses pembelajaran di kelas dan proses pendidikan di sekolah. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah nilai tertinggi dari input, proses, output dan outcome pendidikan, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar nasional pendidikan, mutu pendidikan diukur melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Berkaitan dengan pemetaan mutu, Satori (2016) menyatakan bahwa pemetaan mutu adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan peta mutu pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara, pemerintah daerah, dan pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Mutu pendidikan Indonesia dinilai berdasarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan. Jadi pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas SNP dalam suatu kurun waktu yang ditentukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah untuk menghasilkan peta mutu pendidikan.

Peta mutu adalah representasi visual yang menyoroti profil mutu satuan pendidikan dalam wilayah tertentu yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan. Dengan kata lain peta mutu diperoleh dari suatu proses pemetaan berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan dengan output berupa profil mutu yang di tingkat berikutnya diintegrasikan dalam batasan wilayah tertentu.

Pengumpulan data dan informasi dari profil satuan pendidikan idealnya dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan karena pada hakikatnya sebuah peta harus dapat memberikan informasi bagi penggunanya untuk dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Sebagai sebuah media informasi peta mutu harus memiliki kemudahan bagi penggunanya, kemudahan yang dimaksud berarti adanya kejelasan informasi dan tingkat keterbacaan peta yang cukup tinggi. Untuk itu suatu peta mutu diharapkan dapat disajikan dalam tampilan yang menarik, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif supaya tujuan pembuatan peta mutu dapat tercapai.

Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (baseline data) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian ke-8 SNP dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Sumber data dari penyusunan peta mutu di tiap tingkatan wilayah adalah data profil di tingkat satuan pendidikan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif kondisi satuan pendidikan dalam lingkup standar nasional pendidikan. Agregasi profil satuan pendidikan di tingkat selanjutnya diharapkan dapat disusun untuk menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan untuk mendorong satuan pendidikan dalam melakukan upaya penjaminan mutu. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyusun profil capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan adalah instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS dapat digunakan satuan pendidikan untuk mengumpulkan data entitas satuan pendidikan dan data kualitas layanan pendidikan dengan acuan SNP.

Sebuah siklus dalam konteks sistem penjaminan mutu mensyaratkan output

proses pemetaan yang berupa peta mutu pendidikan dapat menjadi input bagi proses peningkatan mutu berkelanjutan. Secara operasional proses peningkatan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal berupa program supervisi dan fasilitasi kepada satuan pendidikan. Penyusunan program supervisi dan fasilitasi dalam berbagai bentuknya dapat dilakukan apabila peta mutu yang disusun dapat digunakan sesuai kebutuhan. Untuk itu peta mutu pendidikan berbasis hasil capaian SNP hendaknya dapat dikembangkan menjadi peta dengan tema-tema tertentu yang lebih spesifik sesuai data dan informasi yang ada dalam profil satuan pendidikan. Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (baseline data) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Secara khusus tujuan penyusunan peta mutu dapat diturunkan dalam tingkat wilayah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Badung dapat melakukan agregasi profil mutu satuan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pendidikan di wilayah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah kabupaten Badung dapat melakukan pemetaan mutu di daerahnya dan menggunakannya sebagai dasar dalam penyusunan peraturan daerah tentang pendidikan, perencanaan program dan penganggaran pendidikan, dan koordinasi antarkecamatan dalam pelayanan pendidikan yang bermutu
3. Pemerintah dapat menggunakan profil mutu satuan pendidikan untuk menyusun peta mutu pendidikan provinsi sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengalokasian anggaran di sektor pendidikan.

Secara visual peta mutu dapat disajikan dalam berbagai bentuk diagram, carta (daftar), matriks dan narasi dari data dan informasi yang ditampilkan. Sebagai agregat dari sejumlah profil dalam satu wilayah, visualisasi komperatif dari data dan informasi antar profil menjadi suatu alternatif informasi yang dapat ditampilkan dalam peta mutu pendidikan.

B. Indikator Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara

sistematis, terencana dan berkelanjutan. Bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sistem penjaminan mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud No. 28 Tahun 2016)

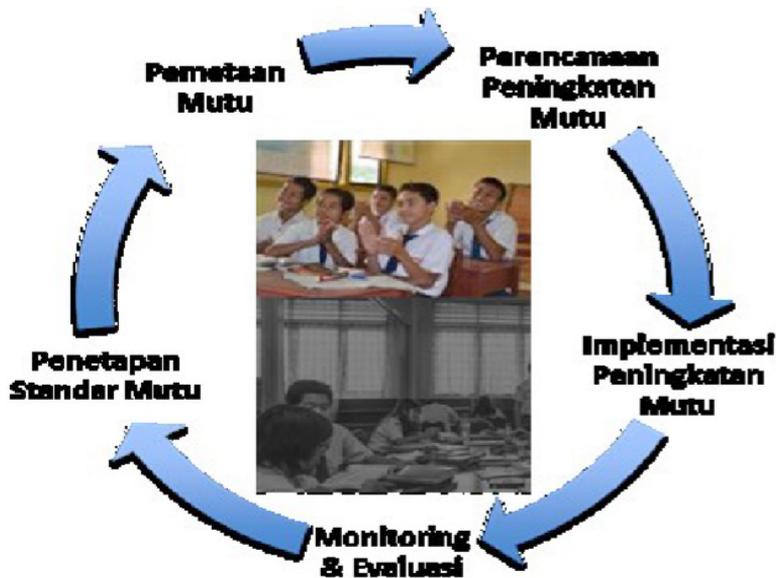
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan, sedangkan sistem informasi penjaminan mutu yang menunjang implementasi kedua sistem di atas.

Sistem mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas.

1. Penetapan standar sebagai landasan dimana Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi
2. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan

3. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah
4. Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam program kerja maupun proses pembelajaran; dan
5. Evaluasi/audit terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan Kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk Kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan bermutu.

Secara lengkap kelima siklus tersebut disajikan dalam gambar berikut.

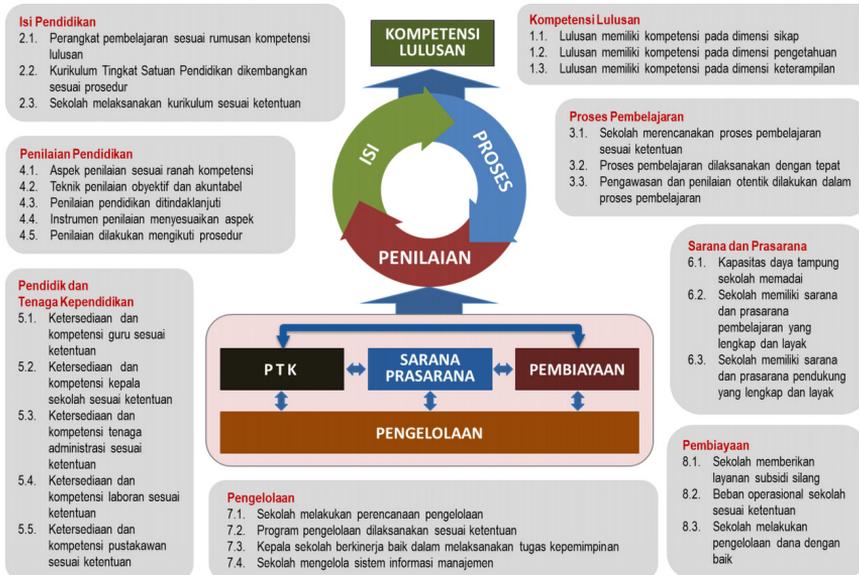


Gambar 2.2 Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Seluruh siklus ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sementara siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas: (1) pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis; (3) fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; (4) monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; (5) penetapan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan; dan (6) pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian. Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga standardisasi (BSNP) dan lembaga akreditasi BAN S/M atau lembaga akreditasi mandiri sesuai kewenangan masing-masing. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar

Sarana dan Prasarana, dan (8) Standar Pembiayaan.

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsi-kan dalam bentuk hubungan sebab-akibat dengan output. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan. Secara ringkas indicator mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3 Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP

C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan

Pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait pada satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Sarana dan Prasarana; dan (8) Standar Pembiayaan Pengumpulan data mutu pendidikan Tahun 2017 berdasarkan 8 SNP dilaksanakan pada pertengahan tahun melalui aplikasi

PMP yang merupakan bagian dari aplikasi Dapodik. Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan yang digunakan dalam program SPMP Tahun 2018 terdiri dari 8 (delapan) SNP yang tertuang dalam 28 indikator dan 189 sub indikator, yaitu.

Tabel 2.1 Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
1	Standar Kompetensi Lulusan	1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
				1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berakhlak
				1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin
				1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun
				1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur
				1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli
				1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri
				1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab
				1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat
				1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani
		1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
		1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif
				1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif
				1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis
				1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri
				1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif
				1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
2	Standar Isi	2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap
				2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan
				2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan
				2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa
				2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran
		2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum
				2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan
				2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan
				2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan
		2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku
				2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi
				2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal
				2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa
3	Standar Proses	3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan
				3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi
				3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis
				3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah

Kode Standar / Standar	Kode Indikator / Indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator
	3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	<p>3.2.1. Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan</p> <p>3.2.2. Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran</p> <p>3.2.3. Mendorong siswa mencari tahu</p> <p>3.2.4. Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah</p> <p>3.2.5. Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi</p> <p>3.2.6. Memberikan pembelajaran terpadu</p> <p>3.2.7. Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;</p> <p>3.2.8. Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif</p> <p>3.2.9. Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat</p> <p>3.2.10. Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.</p> <p>3.2.11. Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.</p> <p>3.2.12. Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa</p> <p>3.2.13. Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran</p> <p>3.2.14. Menggunakan aneka sumber belajar</p> <p>3.2.15. Mengelola kelas saat menutup pembelajaran</p>
	3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	<p>3.3.1. Melakukan penilaian otentik secara komprehensif</p> <p>3.3.2. Memanfaatkan hasil penilaian otentik</p> <p>3.3.3. Melakukan pemantauan proses pembelajaran</p> <p>3.3.4. Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru</p> <p>3.3.5. Mengevaluasi proses pembelajaran</p> <p>3.3.6. Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran</p>

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan
				4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah
		4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel
				4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap
		4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian
				4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik
		4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap
				4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan
				4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan
		4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur
				4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur
				4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai
		5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan
5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang				
5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran				
5.1.4.	Bersertifikat pendidik				
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik				
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik				
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik				
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik				

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4
				5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan
				5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan
				5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara
				5.2.5.	Bersertifikat pendidik
				5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah
				5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik
				5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik
				5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik
				5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
		5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi
				5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat
				5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat
				5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi
				5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan
				5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik
				5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik
				5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		5.4. Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium
			5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai
			5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat
			5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai
			5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran
			5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
			5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran
			5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
			5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
			5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik
			5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik
			5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik
		5.5. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan
			5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai
			5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat
			5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai
			5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan
			5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan
			5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik
			5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik
			5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik
			5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
			5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
			5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai
				6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan
		6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar
				6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar
				6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar
				6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar
				6.2.5.	Memiliki laboratorium biologi sesuai standar
				6.2.6.	Memiliki laboratorium fisika sesuai standar
				6.2.7.	Memiliki laboratorium kimia sesuai standar
				6.2.8.	Memiliki laboratorium komputer sesuai standar
				6.2.9.	Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar
				6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai
				6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai
				6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai
				6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai
6.2.14.	Kondisi laboratorium biologi layak pakai				
6.2.15.	Kondisi laboratorium fisika layak pakai				
6.2.16.	Kondisi laboratorium kimia layak pakai				
6.2.17.	Kondisi laboratorium komputer layak pakai				
6.2.18.	Kondisi laboratorium bahasa layak pakai				

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar
				6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar
				6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar
				6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar
				6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar
				6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar
				6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar
				6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar
				6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar
				6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar
				6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak
				6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai
				6.3.13.	Menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja
				6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai
				6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai
				6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai
				6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai
				6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar
				6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai
				6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai
				6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai
				6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai
				6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan
				7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan
				7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator					
		7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap				
				7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan				
				7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan				
				7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri				
				7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan				
				7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran				
		7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik				
				7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan				
				7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik				
				7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik				
				7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan				
				7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik				
		7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan				
				8	Standar Pembiayaan	8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu
				8.1.2.				Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	
				8.1.3.				Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	
					8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	
							8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	8.3.1.
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana								
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan								

D. Sumber Data Peta Capaian SNP

Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018 ini diperoleh dari data yang terkumpul dan dipublikasikan secara lengkap pada bulan Juni 2019 baik data yang bersumber dari Dapodik (dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id) maupun data yang bersumber dari PMP (pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id). Capaian meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) standar pembiayaan.

E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 – 7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

1. Menuju SNP level 1 : skor $< 2,04$
2. Menuju SNP level 2 : $2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
3. Menuju SNP level 3 : $3,70 \leq \text{skor} < 5,07$
4. Menuju SNP level 4 : $5,07 \leq \text{skor} < 6,67$
5. SNP : $6,67 \leq \text{skor} \leq 7,00$

BAB III

HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SMP KABUPATEN BADUNG

A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018

Pada bagian ini akan disajikan capaian SNP secara umum dan perbandingannya dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018. Sebelumnya juga akan dipaparkan progres pengiriman data baik pada data PMP maupun Dapodik tahun 2018 sebagai dasar analisis rapor mutu daerah.

1. Progres Pengiriman Data pada Dapodik Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018

Tabel 3.1 Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018

No	Wilayah	Total %	Total Sekolah	Kirim	Sisa
1	Kec. Petang	100	4	4	0
2	Kec. Abiansemal	100	7	7	0
3	Kec. Mengwi	100	15	15	0
4	Kec. Kuta Utara	100	18	18	0
5	Kec. Kuta	100	7	7	0
6	Kec. Kuta Selatan	100	15	15	0
	Total	100	66	66	0

Sumber: <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres-smp/2/220400>
(diunduh tanggal 13-06-2019; 15:35)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SMP di Badung sebanyak 66 sekolah. Sampai batas waktu pengambilan data pada laman Dapodik seluruh sekolah telah mengirimkan datanya. Sedangkan progres pengiriman data pada tingkat Provinsi Bali, Kabupaten Badung ada pada urutan ke 4. Data jumlah sekolah ini menunjukkan banyaknya sekolah yang telah mengirimkan data Dapodik sampai batas waktu penutupan pengiriman data Dapodik. Data ini diberikan sebagai perbandingan jika dalam analisis data mutu, Tim Penjaminan Mutu pendidikan Daerah menemukan perbedaan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu pada standar yang berbeda. Misalnya pada standar

Sarana Prasarana jumlah sekolah berbeda dengan pada standar kompetensi lulusan.

2. Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018

Untuk mengetahui jumlah sekolah yang sudah mengirimkan data PMP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018

No	Wilayah	Total %	Total Sekolah	Kirim	Sisa
1	Kec. Petang	100	4	4	0
2	Kec. Abiansemal	83.33	6	5	1
3	Kec. Mengwi	100	13	13	0
4	Kec. Kuta Utara	100	12	12	0
5	Kec. Kuta	100	6	6	0
6	Kec. Kuta Selatan	86.67	15	13	2
	Total	94.64%	56	53	3

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/>
(diunduh tanggal 13-06-2019; 15:35)

Sesuai data DAPODIK Tahun 2018 di Kabupaten Badung tercatat 66 SMP, namun yang baru terdata di PMP sebanyak 56 SMP. Hal ini disebabkan terdapat 5 SMP Negeri baru dan 7 SPK dan 2 sekolah tidak beroperasi lagi. Dari 56 SMP yang terdata di PMP baru 53 sekolah yang sudah mengirim data dan 3 sekolah yang belum mengirim datanya dengan alasan : 1) Dua Sekolah sudah non aktif (SMP Pandawa Abiansemal dan SMP Dirgayusa Kuta Selatan), 2) Satu sekolah SPK (SMP Cendekia Harapan).

3. Gambaran Umum Capaian SNP SMP Kabupaten Badung

Perbedaan utama tampilan rapor mutu Tahun 2018 adalah adanya jumlah sekolah serta data sekolah yang telah mencapai level tertentu pada setiap standar. Pada tingkat kecamatan bahkan ketika angka yang menunjukkan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu di-klik akan muncul nama-nama sekolah tersebut. Dengan demikian daerah akan mudah melakukan intervensi terhadap sekolah tersebut pada masing-masing standar. Berikut adalah capaian SNP pada jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018. Adapun respondennya adalah sebagai berikut.

Gambar 3.2 Data Responden pada Rapor Mutu Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018

No.	Responden	Jumlah
1.	Jumlah Sekolah	53
2.	Pengawas	7
3.	Guru	2067
4.	Siswa	795
5.	Komite	53
	TOTAL	2975

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

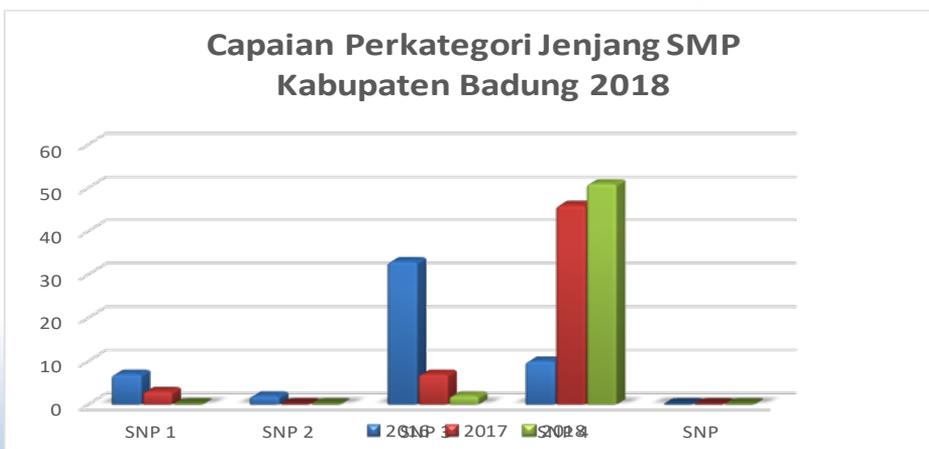
Tabel 3.4 Capaian SNP pada level tertentu pada Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018

No	Standar/Indikator/Sub	Capaian 2018		Kinerja	Sasaran				
		Nilai	Kategori		M1	M2	M3	M4	SNP
1.	Standar Kompetensi Lulusan	6,60	★★★★		0	0	0	27	26
2.	Standar Isi	5,87	★★★★		0	0	2	48	3
3.	Standar Proses	6,64	★★★★		0	0	0	27	26
4.	Standar Penilaian Pendidikan	6,31	★★★★		0	0	1	37	15
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,67	★★		4	18	31	0	0
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,07	★★★		0	9	44	0	0
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	6,16	★★★★		0	0	1	52	0
8.	Standar Pembiayaan	5,55	★★★★		1	3	9	39	1

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa kolom nilai adalah besarnya capaian nilai standar yang diperoleh yang didapat dari rata-rata nilai indikatornya. Sedangkan rata-rata nilai indikatornya didapat dari rata-rata sub indikatornya. Kolom katagori adalah level capaian masing-masing sekolah pada standar mulai bintang 1 sampai bintang 5, sesuai kriteria nilai yang sudah dibuatkan intervalnya. Kolom kinerja adalah capaian peningkatan/penurunan hasil SNP dari tahun sebelumnya. Dari tampilan garis pendek tersebut yang terlihat menurun adalah pada standar PTK dan standar sarpras. Kolom sasaran menunjukkan banyaknya sekolah yang berada pada level tertentu. Misalnya pada SKL ada sebanyak 26 sekolah yang sudah mencapai SNP dan 27 sekolah yang berada pada level menuju SNP 4. Selanjutnya dari Tabel 3.3 didapat bahwa 3 standar yaitu PTK, sarpras dan pengelolaan tidak mencapai SNP. Sedangkan standar pembiayaan hanya dicapai oleh 1 sekolah yang mencapai SNP. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 3.2 Capaian Rapor Mutu Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php?d=1>

Berdasarkan data pada Gambar 3.2 dapat dijelaskan bahwa banyaknya sekolah yang berada pada level menuju SNP 1 semakin berkurang. Pada Tahun 2016 ada 7 sekolah, pada Tahun 2017 ada 3 sekolah dan pada Tahun 2018 sudah tidak ada lagi sekolah yang berada pada level ini. Ini menunjukkan bahwa sekolah semakin mampu dalam meningkatkan level standarnya. Begitu pula pada level menuju SNP 2 dan menuju SNP 3 semuanya mengalami penurunan jumlah. Sedangkan pada level menuju SNP 4, sudah pasti mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 ada 10 sekolah, pada Tahun 2017 meningkat menjadi 46 sekolah sedangkan pada Tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 51 sekolah.

Besarnya capaian SNP untuk masing-masing standar dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

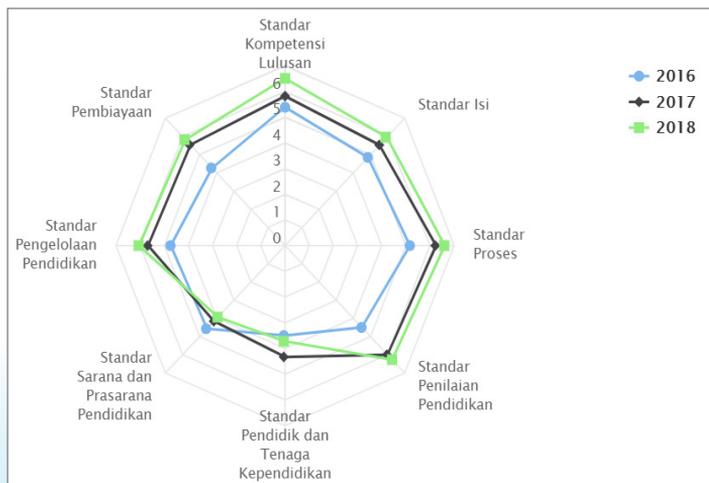
Tabel 3.5 Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018

NO	SNP	2016	2017	2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	5,41	5,80	6,60
2	Standar Isi	4,64	5,49	5,87
3	Standar Proses	5,05	6,18	6,64
4	Standar Penilaian Pendidikan	4,31	6,02	6,31
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,56	4,19	3,67
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,84	4,34	4,07
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4,63	5,72	6,16
8	Standar Pembiayaan	4,13	5,30	5,55

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa capaian tiap standar hampir semuanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya saja untuk standar pendidikan dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana yang mengalami sedikit penurunan. Untuk lebih mudah melihatnya dapat dilihat pada grafik jaring laba-laba berikut.

Gambar 3.3 Grafik radar capaian mutu SNP jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Grafik radar menunjukkan bahwa pada Standar PTK dan Standar Sarana-Prasarana terjadi penurunan garis sedangkan dan terjadi perpotongan pada Sarana Prasarana dengan Pembiayaan. Untuk melihat penurunan dan penyebabnya akan dibahas dalam analisis setiap standar di bagian berikutnya.

B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan

Setelah melihat gambaran umum capaian SNP pada semua standar tahun 2018, berikutnya akan dianalisis masing-masing standar untuk mencari solusi pemecahan masalah dan memunculkan rekomendasi yang dijadikan program perencanaan pemenuhan mutu pada tahun berikutnya. Hasil pada capaian SKL adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6 Capaian SKL Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018

1 Standar Kompetensi Lulusan		6.6	★★★★
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.96	★★★★
1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	6.97	★★★★
1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berakhlak	6.98	★★★★
1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6.97	★★★★
1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6.99	★★★★
1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	6.96	★★★★
1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6.97	★★★★
1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	6.92	★★★★
1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	6.97	★★★★
1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	6.89	★★★★
1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6.99	★★★★
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	5.59	★★★★
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	5.59	★★★★
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.74	★★★★
1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	6.58	★★★★
1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	6.25	★★★★
1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	6.85	★★★★
1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	6.98	★★★★
1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6.98	★★★★
1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	6.83	★★★★
2 Standar Isi		5.87	★★★★
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5.3	★★★★

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Besarnya capaian SKL pada rapor mutu SMP Kabupaten Badung Tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-ratanya sebesar 6,6. Dari ketiga indikator SKL yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan nilai yang paling rendah adalah 5,59 pada pengetahuan. Indikator pengetahuan ini hanya memiliki satu sub indikator yaitu indikator 1.2.1 Memiliki pengetahuan faktual, prosuderal, konseptual, metakognitif. Dengan demikian penyebab rendahnya hanyalah dari sub indikator 1.2.1. Untuk mengetahui dari mana asal data tersebut, perlu ditelusuri asal data dengan membuka tabel konversi excel.

Pada tabel konversi excel ditemukan bahwa data 1.2.1 berasal dari data DAPO dan PMP. Data yang diinput melalui aplikasi dapodik adalah data:

1. Rata-rata nilai rapor siswa kelas 7, 8 dan 9 untuk setiap mata pelajaran

2. Rata-rata hasil UN untuk 4 mapel yang diujikan
3. Tingkat kelulusan siswa kelas 9.

Data pada indikator 1.2.1 yang diperoleh dari pengisian instrumen PMP dapat dilihat pada perangkat instrumen PMP untuk jenjang SMP. Setelah dilakukan analisis atas pertanyaan dan kode sub indikator didapat bahwa pertanyaan untuk 1.2.1 adalah pertanyaan A7 (pada komponen A yaitu komponen hasil belajar dan nomor butir ke-7). Pertanyaan ini terdapat pada responden kepala sekolah dan pengawas. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

Petunjuk untuk nomor 7 - 9,
Arti angka 1 tidak ada; 2 1-5 penghargaan/tahun; 3 6-10 penghargaan/tahun; 4 >10 penghargaan/tahun

7. Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas pengetahuan yang dimiliki

No	Tingkat	Frekuensi			
1	Tingkat Kabupaten	1	2	3	4
2	Tingkat Propinsi	1	2	3	4
3	Tingkat Nasional	1	2	3	4
4	Tingkat Internasional	1	2	3	4

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 7)

Dari 1 nomor pertanyaan akan dijawab 4 butir pertanyaan yang menanyakan prestasi siswa/kelompok atas pengetahuan yang dimiliki oleh sekolah. Sesuai kriteria jika mereka tidak mendapat penghargaan maka mereka pilih angka 1 baik pada tingkat kabupaten/provinsi/nasional/internasional, jika mendapat 1 sampai dengan 5 penghargaan mereka bisa pilih angka dan seterusnya. Sekolah hendaknya mengisi dengan memperhatikan bukti fisik yang ada. Adapun deskripsi dan bukti fisik yang harus diperhatikan pada sub indikator 1.2.1 ini dapat dilihat pada panduan teknis pengisian instrumen (halaman 99) sebagai berikut.

7. Sekolah menunjukkan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh kelompok/ individu siswa untuk mengukur tingkat pengetahuan yang dimiliki siswa sebagai hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah selama satu tahun terakhir.

Diisi mengacu pada:

- a) Piagam penghargaan dalam bentuk piala, plakat atau sertifikat yang dimiliki sekolah pada tahun berjalan.
- b) Diskusi dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah dan siswa.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 104)

Sekolah hendaknya mengisi butir pertanyaan ini dengan jujur untuk memudahkan mereka menentukan target keberhasilan pada program peningkatan berikutnya. Karena dari capaian pengetahuan yang diperoleh tahun ini akan digunakan untuk meningkatkan prestasi pada tahun-tahun berikutnya. Jika prestasi pengetahuan yang diinput sekarang tidak benar maka perencanaan yang dibuat juga tidak akan sesuai. Setelah mencermati

paket instrumen sesuai jenjang, langkah selanjutnya adalah mencermati buku indikator. Pada kode 1.2.1 akan dapat dilihat deskripsi sub indikator untuk siswa jenjang SMP serta penyebab tidak tercapainya standar mutu. Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu adalah sebagai berikut.

1. Kualifikasi dan latar belakang pendidikan guru tidak selaras dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Guru belum memiliki kompetensi yang sesuai standar dan tidak tersertifikasi sebagai pendidik.
3. Alokasi waktu dan beban belajar memberatkan pada sisi siswa.
4. Gaya dan metode pembelajaran yang diterapkan tidak mengarah pada bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
5. Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana belum memadai, dan lainnya.

Dengan memperhatikan buku indikator mutu yaitu pada penyebab tidak tercapainya standar mutu dapat diketahui masalah dan akar masalah, sehingga akan mudah membuat rekomendasi dan program pada perencanaan mutu. Adapun pilihan rekomendasi yang dapat diajukan daerah adalah sebagai berikut.

1. Perlu membuat program penyesuaian kualifikasi guru dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Perlu diberikan pelatihan peningkatan kompetensi pada mata pelajaran yang diampu melalui kegiatan PKB.
3. .Perlu diberikan pelatihan terkait dengan gaya dan metode pembelajaran yang mengarah pada pengembangan bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.

Dari pilihan rekomendasi standar kelulusan dapat disimpulkan menjadi perlu mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pada mata pelajaran yang diampu melalui kegiatan PKB.

C. Analisis Capaian Standar Isi

Analisis berikutnya adalah capaian pada standar isi. Seperti pada analisis SKL langkah yang dilakukan adalah mencermati rapor mutu pada standar isi, terutama capaian yang paling rendah karena akan menjadi prioritas penanganan. Setelah itu menelusuri asal data dengan membuka file tabel konversi, selanjutnya membuka paket instrumen dan pedoman teknisnya serta mencermati buku indikator mutu untuk membuat rekomendasi. Adapun capaian rapor mutu pada standar isi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7 Capaian Standar Isi Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018

2 Standar Isi		5.87	★★★★
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5.3	★★★★
2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	5.61	★★★★
2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	6.06	★★★★
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	5.88	★★★★
2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	4.52	★★★
2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	4.45	★★★
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	6.21	★★★★
2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	5.69	★★★★
2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	6.99	★★★★★

2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan	5.54	★★★★
2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan	6.62	★★★★
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	6.08	★★★★
2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	6.99	★★★★
2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi	5.9	★★★★
2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	4.67	★★★
2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa	6.77	★★★★
3 Standar Proses		6.64	★★★★
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.73	★★★★
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	6.92	★★★★
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	6.91	★★★★
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	6.67	★★★★
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	6.4	★★★★

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 3 indikator pada standar isi, capaian yang paling rendah adalah indikator 2.1. Adapun penyebab rendahnya nilai indikator itu adalah capaian terendah dari sub indikatornya yaitu pada sub indikator 2.1.5 yaitu “Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran. Setelah ditelusuri datanya pada tabel konversi didapat bahwa terdapat 8 butir pertanyaan pada sub indikator 2.1.5 yaitu pada pertanyaan B. Isi pendidikan pada butir nomor 7, yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun butir pertanyaannya sebagai berikut.

7. Kesesuaian tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi dalam mata pelajaran di sekolah anda
Petunjuk arti angka adalah 1 tidak ada; 2 < 50%; 3 antara 51-85%; 4 > 85%

No	Mata Pelajaran	Tingkat kompetensi				Ruang Lingkup Materi			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1	2	3	4	1	2	3	4
3	Bahasa Indonesia	1	2	3	4	1	2	3	4
4	Matematika	1	2	3	4	1	2	3	4
5	Ilmu Pengetahuan Alam	1	2	3	4	1	2	3	4
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	1	2	3	4	1	2	3	4
7	Bahasa Inggris	1	2	3	4	1	2	3	4
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	1	2	3	4	1	2	3	4

Sumber: *Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 12)*

Berdasarkan kutipan dari instrumen dapat dijelaskan bahwa kesesuaian ruang lingkup materi untuk 8 mata pelajaran yang dipilih akan menentukan capaian hasil SNP nya. Untuk bisa menentukan apakah guru memperoleh skor 1, 2, 3 atau 4 maka bukti fisik mengacu pada kolom berikut.

7. Perangkat pembelajaran dikembangkan untuk semua mata pelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi pembelajaran. Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.
- Diisi mengacu pada:
- Perangkat pembelajaran semua mata pelajaran.
 - Buku yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran.
 - Silabus dan RPP Guru mata pelajaran pada semua tingkat dan kelas.
 - Telaah kesesuaian perangkat pembelajaran dengan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi.

Sumber: *Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)*

Hal terpenting yang harus dilihat saat pengisian adalah bahwa guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu. Bukti fisiknya adalah bahwa silabus dan RPP guru mata pelajaran pada semua tingkat dan kelas. Jika guru memberi skor 4 berarti riilnya guru telah memiliki silabus dan RPP yang lengkap paling tidak di atas 85% dari semua RPP yang mereka harus buat. Misalnya ada 20 RPP untuk matematika, maka guru matematika tersebut minimal telah membuat 18 RPP yang sudah sesuai ruang lingkup materinya. Jika dari 18 RPP yang dibuat hanya 10 yang baru sesuai ruang lingkup materinya, maka guru tersebut harus memberi skor 3. Terlebih lagi jika guru tidak membuat RPP atau hanya membuat RPP hanya 2 buah, maka guru tersebut harus memberi skor pada butir tersebut 2. Langkah selanjutnya adalah mencermati indikator mutu pada butir 2.1.5.

Deskripsi dari sub indikator 2.1.5 adalah sebagai berikut.

Deskripsi:

- ❖ Menyesuaikan dengan perkembangan siswa pada jenjang SMP/MTs yaitu pada konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
- ❖ Menyesuaikan dengan yang dipelajari pada jenjang pendidikan dan sumber lain secara mandiri.
- ❖ Menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan.

Sumber: Indikator Mutu (2017: 20)

Resiko jika standar mutu tersebut tidak dicapai adalah sebagai berikut.

1. Materi pembelajaran sulit dicerna oleh siswa.
2. Lingkup pembelajaran yang diterima siswa tidak berkembang antar jenjang pendidikan.

Ketidaktercapaian standar mutu tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Kompetensi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran kurang.
2. Sekolah belum memperhatikan perkembangan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan, fungsi sekolah dan lingkungan siswa.

Dari resiko dan penyebab tersebut dapat dibuat rekomendasi pemenuhan mutu sebagai prioritas adalah sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan pelatihan tentang analisis SK-KD-Materi Pembelajaran melalui program Keprofesian Berkelanjutan (PKB) untuk meningkatkan kompetensi guru. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam pelatihan ini adalah berupa pelatihan, pendampingan, supervisi, studi banding, belajar mandiri, *lesson study*, dan sebagainya).
2. Perlu membuat program pembelajaran dengan memperhatikan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan serta fungsi dan lingkungan siswa.

Secara ringkas rekomendasi tersebut dapat dituliskan, untuk meningkatkan mutu standar isi perlu melaksanakan pelatihan tentang analisis SK-KD-Materi Pembelajaran melalui program Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

D. Analisis Capaian Standar Proses

Berikut adalah capaian setiap sub indikator pada standar proses pada rapor mutu SMP Kabupaten Badung Tahun 2018.

Tabel 3.8 Capaian Standar Proses Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018

3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	6.86	*****
3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	6.85	*****
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6.9	*****
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	6.9	*****
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	6.83	*****
3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	6.82	*****
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	6.93	*****
3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	6.92	*****
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.	6.85	*****
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa	6.52	****
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	6.39	****
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	6.67	*****
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	6.91	*****
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6.41	****
3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif	5.95	****
3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik	6.73	*****
3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran	6.64	****
3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	6.08	****
3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran	6.42	****
3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	6.63	****
4	Standar Penilaian Pendidikan	6.31	****

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Indikator yang mendapat nilai tertinggi pada standar ini adalah 3.2 proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat, khususnya sub indikator 3.2.9 mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan responden mengisi instrument dengan ‘selalu’ (4) sehingga nilainya mendekati sempurna.

Dari 3 indikator yang terdapat dalam standar proses, capaian pada indikator 3.3 yang paling rendah. Dari 6 sub indikatornya ada 1 capaian yang rendah yaitu 3.3.1 dengan capaian 5,95. Capaian yang paling rendah adalah 3.3.1, tetapi jika daerah ingin mengkaji lebih lengkap dapat menambahkan sub indikator 3.3.2 karena biasanya akar masalah dan resiko tidak tercapainya standar mutu tersebut ada kemiripan. Data sub indikator 3.3.1 didapat dari 3 butir pertanyaan pada instrumen komponen C (proses pendidikan) nomor butir 14 yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Butir pertanyaan adalah sebagai berikut.

14. Aspek dan perangkat penilaian otentik yang digunakan guru di sekolah anda

No	Aspek	Angket	Observasi	Catatan Anekdote	Refleksi
1	Kesiapan siswa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Proses belajar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Hasil belajar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Pertanyaan ini bertujuan untuk menanyakan apakah guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian terhadap siswa baik pada kesiapan belajarnya (sebelum pembelajaran), proses belajar (selama pembelajaran) dan hasil belajar (setelah pembelajaran). Jika guru melakukan ketiga hal tersebut, berarti guru sudah melaksanakan penilaian secara otentik. Guru dapat memilih jenis penilaian yang digunakan. Untuk melihat bukti fisik yang diacu, dapat melihat pedoman teknis pengisian instrumen sesuai nomor butir pertanyaannya, seperti berikut ini.

14. Penilaian otentik menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap. Guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian otentik secara komprehensif, baik di kelas, bengkel kerja, laboratorium, maupun tempat praktik kerja, dengan menggunakan: angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen instrumen penilaian otentik,
- b) Observasi pelaksanaan penilaian otentik,
- c) Hasil penilaian otentik;
- d) Diskusi dengan guru

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Penilaian otentik ini muncul pada standar proses. Hal ini bisa dijelaskan bahwa sesuai pedoman teknis di atas bahwa keterpaduan kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh akan menggambarkan kapasitas, gaya dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan sikap. Jadi dengan melakukan penilaian otentik secara komprehensif akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah/pengawas/guru dapat menentukan jawaban dari bukti fisik yang mereka miliki seperti dokumen instrumen penilaian otentik, observasi pelaksanaan otentik, hasil penilaian dan diskusi dengan guru.

Ketidaktercapaian standar mutu pada sub indikator 3.3.1. akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut.

1. Guru kesulitan dalam memperbaiki proses pembelajaran.
2. Siswa tidak memiliki dorongan untuk mencapai aspek pengetahuan dan keterampilan.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena guru belum memahami prosedur penilaian otentik dengan baik serta guru belum mampu mengidentifikasi instrumen yang dapat digunakan sebagai penilaian otentik.

Dengan mencermati resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu pada 3.3.1 maka dapat dibuatkan rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam memahami penilaian otentik dengan baik.
2. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengidentifikasi instrumen penilaian sehingga dapat memilih dan mengembangkan instrumen penilaian otentik.

Secara ringkas rekomendasi yang dapat diajukan pada standar proses ini adalah: perlu membuat pelatihan tentang penilaian otentik secara komprehensif.

E. Analisis Capaian Standar Penilaian

Berikut ini disajikan capaian standar penilaian rapor mutu jenjang SMP kabupaten Badung tahun 2018.

Tabel 3.9 Capaian Standar Penilaian Jenjang SMP Provinsi Bali Tahun 2018

4 Standar Penilaian Pendidikan		6.31	★★★★
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.72	★★★★
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	6.73	★★★★
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	6.72	★★★★
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	6.3	★★★★
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	6.59	★★★★
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	6.01	★★★★
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.69	★★★★
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	6.79	★★★★
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	6.6	★★★★
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	6.15	★★★★
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	6.13	★★★★
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	6.25	★★★★
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	6.07	★★★★
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.68	★★★★
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	6.64	★★★★
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	6.65	★★★★
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai	3.76	★★
5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		3.67	★★
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3.47	★★
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	5.95	★★★★
5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran	0	★
5.1.4.	Bersertifikat pendidik	4.78	★★★

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 5 indikator pada standar penilaian ini yang memiliki nilai terendah adalah pada indikator ke-5 dan nilai terendah sub indikatornya adalah 4.5.3. Hasil penelusuran data pada sub indikator 4.5.3 diperoleh informasi bahwa terdapat 40 butir pertanyaan dari perangkat instrumen PMP yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

12. Pertimbangan cara hitung penilaian pendidikan di sekolah anda

No	Mata Pelajaran	Penilaian Hasil Belajar					Kelulusan				
		Ulangan	Pengamatan	Penugasan	Penilaian Lain	Total	Ujian Sekolah	Penilaian Sikap	Penilaian Pengetahuan	Penilaian Keterampilan	Total
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
3	Bahasa Indonesia	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
4	Matematika	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
5	Ilmu Pengetahuan Alam	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
7	Bahasa Inggris	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
8	Seni Budaya	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
9	Prakarya	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
10	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Pertanyaan untuk sub indikator 4.5.3 adalah terletak pada pernyataan yang diberi kotak yaitu pada komponen kelulusan. Pada komponen tersebut ada 4 kolom yang isinya masing-masing adalah ujian sekolah, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sedangkan jumlah mata pelajaran ada 10, sehingga banyaknya isian sebanyak 4 x 10 yaitu 40 butir pertanyaan. Persentase yang diisi pada kolom komponen tersebut harus berjumlah 100% sesuai nilai yang sudah ditulis pada total. Guru hanya mengisi sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Untuk menentukan cara menjawab dari responden dapat dilihat pada pedoman teknis instrumen sebagai berikut.

12. Guru mempertimbangkan penilaian hasil belajar siswa dalam bentuk:

- Ulangan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Siswa.
 - Pengamatan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indra, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator hasil belajar yang diamati.
 - Penugasan dengan memberikan tugas yang dikerjakan siswa secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.
 - Bentuk penilaian lain dapat berupa jurnal, portofolio, dan penilaian proyek.
- Sekolah mempertimbangkan penentuan kelulusan siswa berdasarkan:
- Ujian sekolah.
 - Penilaian sikap.
 - Penilaian pengetahuan.
 - Penilaian keterampilan.
- Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, pengamatan, penugasan dan bentuk lain.
- b) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, UAS, UUK, UKK.
- c) Diskusi dengan guru dan siswa.
- d) Pedoman ketentuan kelulusan.
- e) Notulen rapat penentuan kelulusan.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Setelah memahami dari mana asal data tersebut, langkah selanjutnya mencermati indikator mutu untuk melihat resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut, agar nanti dapat dibuatkan rekomendasinya. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut.

Sub-Indikator 3. Kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai

Deskripsi:

- ❖ Kenaikan kelas dan kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.
- ❖ Pertimbangan penentuan kelulusan siswa:
 - Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - Ujian sekolah.
 - Ujian sekolah berstandar nasional.
 - Penilaian sikap.
 - Penilaian pengetahuan.
 - Penilaian keterampilan.

Resiko yang dapat terjadi jika standar mutu tersebut tidak tercapai adalah:

1. Pengukuran pencapaian kompetensi siswa tidak diketahui dengan tepat.
2. Ketidakadilan bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan memiliki perbedaan latar belakang.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut kesulitan guru dalam memahami konsep dan prosedur penilaian pembelajaran. Dengan mencermati penyebab tidak tercapainya standar mutu pada sub indikator 4.5.3, maka rekomendasi yang dapat diajukan sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan sosialisasi terkait peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan terbaru tentang standar penilaian secara rutin dengan program sistematis dan terencana.
2. Perlu mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan penilaian termasuk penentuan kelulusan siswa.

Secara ringkas rekomendasinya adalah perlu mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan penilaian dan penentuan kelulusan siswa.

F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Kabupaten Badung Tahun 2018 dapat disajikan seperti tabel 3.10 di bawah ini.

Tabel 3.10 Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP
Kabupaten Badung Tahun 2018

5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		3.67	★★
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3.47	★★
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	5.95	★★★★
5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran	0	*
5.1.4.	Bersertifikat pendidik	4.78	★★★
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik	4.7	★★★
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	N/A	*
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik	5.37	★★★★
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik	0	*
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.64	★★★★
5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6.58	★★★★
5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	5.88	★★★★
5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan	5.94	★★★★
5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara	4.76	★★★
5.2.5.	Bersertifikat pendidik	5.15	★★★★
5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah	5.01	★★★
5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	3.42	★★
5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	3.6	★★
5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	3.62	★★
5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	2.79	★★
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	3.7	★★★
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	2.05	★★
5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi	0.39	*
5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat	0.13	*
5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat	N/A	*
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	6.58	★★★★
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	4.32	★★★
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	N/A	*
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik	N/A	*
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik	N/A	*
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik	N/A	*
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.8	*
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium	0.28	*
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai	3.43	★★
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat	N/A	*
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai	2.24	★★
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0	*
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	N/A	*
5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran	1.18	*
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	N/A	*
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	N/A	*
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik	N/A	*
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik	N/A	*
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik	N/A	*
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	1.82	*
5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan	4.35	★★★

5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai	3.69	**
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat	N/A	*
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai	2.24	**
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0	*
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan	1.84	*
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik	N/A	*
5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik	N/A	*
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik	N/A	*
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	N/A	*
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	N/A	*
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik	N/A	*
6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan		4.07	***
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4.34	***
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai		*
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	5.9	****
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan	6.93	*****
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa	3.05	**
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan	6.47	****
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan	1.78	*
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	3.21	**
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	5.71	****
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	2.12	**
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	2.92	**

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Standar pendidik dan tenaga kependidikan ini memiliki 5 indikator yaitu ketersediaan dan kompetensi dari guru, kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, laboran dan pustakawan. Pada perangkat instrument PMP tidak ada butir pertanyaan untuk standar PTK ini, karena capaian nilainya berasal dari input data dapodik. Salah satu penyebabnya, pada saat input data, banyak kepala sekolah belum memiliki sertifikat kepala sekolah. Selain itu kompetensi guru dan kepala sekolah berasal dari nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) Tahun 2015. Berdasarkan capaian hasil dalam Tabel 3.9 dapat dijelaskan hampir semua nilai tenaga kependidikannya (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) rendah, terutama pada ketersediaannya. Karena tidak tersedia maka sudah pasti untuk kompetensi masing-masing akan kosong. Tetapi walaupun tenaga kependidikan (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) di sekolahnya ada, kompetensi ini juga masih tidak ada nilainya (NA/0) karena memang datanya belum tersedia di dapodik.

Pada ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah akan dibahas masing-masing sub indikator. Pada sub 5.2.7 yaitu kepala sekolah berkompetensi berkepribadian baik nilainya 3,42. Jika nilai ini dikonversi ke skala 100, besarnya adalah $3.42/7 \times 100 = 48,86$. Ini berarti masih ada 51,14% kepala sekolah yang belum berkompetensi kepribadian minimal baik. Dengan mencermati indikator mutu, capaian sub indikator 5.2.7 yang belum mencapai standar akan berdampak pada efektifitas pengelolaan pendidikan berkurang dan tidak dapat dijadikan teladan bagi guru dan siswa. Beberapa penyebab indikator ini belum tercapai adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya pemahaman tentang kompetensi kepribadian.
2. Paradigma kepala sekolah terhadap kompetensi kepribadian belum terbentuk.
3. Kurangnya komitmen kepala sekolah.

Dengan demikian beberapa rekomendasi yang dapat dibuat daerah adalah:

1. Perlu terus memotivasi kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi kepribadian.
2. Perlu membuat program penguatan kompetensi kepala sekolah
3. Perlu peningkatan peran MKKS dalam meningkatkan kompetensi kepala sekolah

Sub indikator 5.2.8 yaitu berkompentensi manajerial yang baik nilainya 3,60. Nilai ini jika dikonversi ke dalam skala 100 besarnya $3,60/7 \times 100 = 51,43$. Ini berarti masih ada sekitar 2448,57% kepala sekolah yang belum berkompentensi manajerial yang baik. Hal ini bisa berdampak pada kurang efektifnya pengelolaan pendidikan disekolah yang bersangkutan. Adapun beberapa penyebab tidak tercapainya SNP adalah

1. Kurangnya pemahaman tentang kompetensi manajerial
2. Paradigma kepala sekolah terhadap kompetensi manajerial kurang.
3. Kurangnya komitmen kepala sekolah.

Dengan demikian beberapa rekomendasi yang dapat dibuat daerah adalah:

1. Perlu terus memotivasi kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi manajerial.
2. Perlu membuat program penguatan kompetensi kepala sekolah
3. Perlu peningkatan peran MKKS dalam meningkatkan kompetensi kepala sekolah
4. Perlu supervise manajerial oleh pengawas manajerial yang lebih intensive

Sub indikator 5.2.9 kompetensi kewirausahaan minimal baik juga masih tergolong rendah ($3,62 = 51,7$), sehingga masih sangat perlu untuk diperhatikan. Rendahnya hasil akan berdampak pada kurang efektifnya penegelolaan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut.

1. Kurangnya pemahaman tentang kompetensi kewirausahaan.
2. Paradigma guru terhadap kompetensi kewirausahaan belum terbentuk
3. Kurangnya komitmen kepala sekolah.

Berdasarkan penyebab di atas, rekomendasinya adalah sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman tentang kompetensi kewirausahaan.
2. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat membentuk paradigma kepala sekolah terhadap kompetensi kewirausahaan.
3. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas serta agar hasil supervisi ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Sub indikator 5.2.10 kompetensi supervisi minimal baik masih tergolong rendah. Hal ini berdampak pada efektifitas pengelolaan pendidikan. Ada beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya standar mutu, yaitu

1. Kurangnya pemahaman tentang supervisi
2. Paradigma kepala sekolah terhadap kompetensi supervisi belum terbentuk
3. Tugas kepala sekolah yang sangat banyak, sehingga supervisi akademik maupun manajerial yang harusnya dilakukan oleh kepala sekolah sering tidak terlaksana, sehingga kerap kali diserahkan kepada wakil kepala sekolah dan pelaksanaannya tidak sesuai program

Sub indikator yang masih kurang adalah 5.3.1 tersedia kepala tenaga administrasi dengan nilai 0,39. Angka ini bila dikonversi menjadi $0,39/7 \times 100 = 5,57$, sekitar 94,3% sekolah belum memiliki kepala administrasi yang sesuai dengan SNP. Demikian juga untuk sub indikator 5.3.2 memiliki kepala tenaga administrasi yang berkualifikasi minimal SMK atau sederajat. Nilainya adalah 0,13. Kedua sub indikator ini saling berkaitan dan bisa berdampak pada kurangnya koordinasi antar tenaga administrasi di sekolah. Rekomendasi untuk hal tersebut yaitu

1. Memastikan input data dengan benar dan sesuai ketentuan
2. Melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi kepala tenaga administrasi

Indikator 5.4 ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan. Nilai yang tercantum dalam PMP adalah 0,8 atau setara dengan $0,8/7 \times 100 = 11,43$. Artinya ada 88,57% sekolah yang belum mencapai standar dalam hal ketersediaan dan kompetensi laboran. Hal ini berdampak pada

1. Kegiatan dan pengembangan laboratorium sekolah kurang terencana
 2. Pengelolaan kegiatan laboratorium sekolah tidak berkala dan berkelanjutan
 3. Tugas teknisi dan laboran laboratorium sekolah kurang terkoordinir
 4. Pemantauan sarana dan prasarana laboratorium sekolah kurang optimal
 5. Kinerja teknisi dan laboran serta kegiatan laboratorium sekolah luput dari evaluasi
 6. Tugas dan fungsi kepala tenaga laboratorium dibebankan pada kepala sekolah/ guru
- Penyebab tidak tercapainya standar mutu adalah ketidakterseediaannya tenaga laboran yang sesuai dengan standar yang ditentukan

Indikator 5.5 ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan. Nilai yang tercantum dalam PMP adalah 1,82 atau setara dengan $1,82/7 \times 100 = 26$. Artinya ada 74% sekolah yang belum mencapai standar dalam hal ketersediaan dan kompetensi pustakawan. Hal ini berdampak pada

1. Program perpustakaan kurang terencana
2. Pelaksanaan perpustakaan sekolah kurang optimal
3. Program dan pelaksanaan perpustakaan tidak terpantau dan terevaluasi

Penyebab tidak tercapainya standar mutu adalah ketidakterseediaannya tenaga pustakawan yang sesuai standar yang ditentukan. Rekomendasi yang disarankan untuk mengatasi hal tersebut diatas adalah instansi terkait agar menempatkan tenaga pustakawan yang memiliki kualifikasi yang sesuai.

Berdasarkan uraian terhadap seluruh indikator dan subindikator di atas maka secara umum dapat diajukan rekomendasi, perlu diklat peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar.

G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana

Analisis pada standar sarana prasarana ini sebenarnya sangat banyak, karena nilai rata-rata capaian standarnya sangat rendah yaitu 3,93, sebagai akibat nilai indikator dan sub indikatornya banyak yang rendah. Tetapi pada standar sarpras ini yang akan dianalisis adalah sub indikator 6.2.10 yaitu kondisi ruang kelas layak pakai.

Tabel 3.11 Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018

6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan		4.07	***
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4.34	***
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai		*
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	5.9	****
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan	6.93	*****
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa	3.05	**
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan	6.47	****
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan	1.78	*
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	3.21	**
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	5.71	****
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	2.12	**
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	2.92	**
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar	0.07	*
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	6.15	****
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai	2.02	**
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai	0	*
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai	6.94	*****
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	2.8	**
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	2.17	**
6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar	0.41	*
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar	1.32	*
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar	0.26	*
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	3.76	***

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Standar Sarana Prasarana memuat 3 indikator dan 37 sub indikator, mencapai nilai 4,07 sama dengan $4,07/7 \times 100 = 58,14$ atau 41,86% sekolah belum mencapai SNP. Dari ketiga indikator, indikator 6.3 sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak mendapat nilai paling rendah, yaitu 2,8 atau 40%. Hal berarti ada 60% sekolah yang belum sesuai dengan Permendikbud No 24 Tahun 2007 tentang sarana dan prasarana. Hal ini berdampak pada kegiatan pengelolaan sekolah tidak bisa terlaksana dengan baik.

Rekomendasi untuk mengatasi hal tersebut adalah perlu pengadaan sarana dan prasarana yang lengkap dan layak sesuai dengan Permendikbud No 24 Tahun 2007.

H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan memiliki 4 indikator dengan rata-rata nilai 6,16. Di antara 4 indikator ini, capaian nilai yang terendah adalah pada indikator ke-3. Rendahnya nilai kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan ini disebabkan oleh indikator yang terendah yaitu pada indikator 7.3 yaitu kepala sekolah

berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan. Data lengkap bisa dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.12 Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018

7 Standar Pengelolaan Pendidikan		6.16	★★★★
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.69	★★★★
7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	6.86	★★★★
7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	6.72	★★★★
7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	6.5	★★★★
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.52	★★★★
7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	6.19	★★★★
7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	6.77	★★★★
7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	6.5	★★★★
7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	6.61	★★★★
7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	6.55	★★★★
7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	6.48	★★★★
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2.11	★★
7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik		*
7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan	6.3	★★★★
7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	0	*
7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik	6.39	★★★★
7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	0	*
7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik	0	*
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6.62	★★★★
7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	6.62	★★★★
8 Standar Pembiayaan		5.55	★★★★

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Tabel 3.12 di atas menunjukkan bahwa indicator 7.3 mendapatkan nilai 2,11 atau sama dengan 30,14. Hal ini berarti ada 69,86% kepala sekolah belum berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan. Bahkan dari 6 sub indicator terdapat 3 sub indicator yang mendapatkan nilainya 0. Hal ini menyebabkan pengelolaan sekolah berjalan kurang optimal karena warga sekolah tidak mendapatkan figur teladan di sekolah.

Penyebab tidak tercapainya standar mutu adalah kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah belum memenuhi. Rekomendasinya adalah perlu melaksanakan penguatan kompetensi kepala sekolah dan optimalisasi peran MKKS sebagai wadah profesi kepala sekolah.

I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan

Untuk capaian Standar Pembiayaan Pendidikan SMP Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.13 Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SMP
Kabupaten Badung Tahun 2018

8 Standar Pembiayaan		5.55	★★★★
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	5.94	★★★★
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	5.67	★★★★
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	5.67	★★★★
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	6.47	★★★★
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.56	★★★★
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6.56	★★★★
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4.16	★★★
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya	0.13	*
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	6.43	★★★★
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	5.93	★★★★

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Tabel 3.13 di atas menunjukkan Standar Pembiayaan memiliki 3 indikator dengan 7 sub indicator. Rata-rata nilai yang dicapai oleh standar ini adalah 5,55 atau 79,29. Data ini menunjukkan terdapat 20,71% sekolah yang belum mencapai Standar Mutu. Diantara ketiga indikator tersebut, indikator 8.3 sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik mendapatkan nilai yang paling rendah, yaitu 4,16 atau $4,16/7 \times 100 = 59,43$. Angka ini menunjukkan ada 40,57% sekolah belum melakukan pengelolaan dana dengan baik. Sub indicator yang menyebabkan nilai rendah adalah 8.3.1 mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/ yayasan/sumber lain dengan nilai 0,13 sama dengan $0,13/7 \times 100 = 1,86$. Dari data tersebut terdapat 98,14% sekolah belum mencapai SNP.

Akibat dari rendahnya kompetensi standar pembiayaan adalah:

1. Sekolah tidak dapat melaksanakan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai SNP
2. Terdapat biaya yang tidak mendapatkan alokasi pendanaan
3. Rentan terhadap tuduhan tindak pidana KKN kepada bendahara dan kepala sekolah oleh pemangku kepentingan

Adapun penyebab dari rendahnya nilai standar pembiayaan tersebut adalah:

1. Belum diinputnya data penerimaan bantuan dana pada aplikasi dapodik dengan tepat
2. Pengambilan keputusan dalam pendanaan bersama pemangku kepentingan menimbulkan konflik internal
3. Kemampuan pendidik/ tenaga kependidikan dalam pengelolaan pendanaan terbatas
4. Beban kinerja pendidik/tenaga kependidikan yang diberi tugas sebagai bendahara terlalu banyak.
5. mengoptimalkan monev dari pihak terkait.

Sebagai rekomendasi adalah peningkatan kemampuan pendidik/tenaga kependidikan dalam pengelolaan pendanaan adalah perlu mengadakan diklat bagi bendahara dalam pengadministrasian keuangan.

J. Identifikasi Masalah Dalam Penyusunan Peta Mutu Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018

Hasil identifikasi masalah dalam penyusunan peta mutu jenjang SMP Kabupaten Badung tahun 2019 mengacu pada analisis raport peta mutu pendidikan SMP Kabupaten dapat disajikan seperti tabel 3.14 di bawah ini.

Tabel 3.14 Identifikasi Masalah Dalam Penyusunan Peta Mutu Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018

No	Standar	Komponen	Permasalahan	Solusi
1	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	1.1 Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap			
	1.1.10 Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	a. Petugas Pemetaan b. Responden	Nilai 6,99. Nilai terlalu besar. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa factor. Petugas menginput data salah, karena data yang diinput terlalu banyak. Responden mengisi jaaban dengan tidak objektif, dan terlalu banyak menjawab sangat ideal dan tidak sesuai fakta.	Operator harus melakukan validasi data Guru harus mengisi data dengan lengkap dan benar
	1.3 Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi ketrampilan			

	1.3.4 Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	a. Petugas Pemetaan b. Responden	<p>Nilai 6,98. Nilai terlalu besar. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa factor. Petugas menginput tidak memerifikasi dan validasi dari responde.</p> <p>Responden mengisi jawaban dengan tidak objektif,dan terlalu banyak menjawab sangat ideal dan tidak sesuai fakta.</p>	<p>Operator / pengawas agar melakukan verifikasi dan validasi data.</p> <p>Responden agar memperbaiki / melengkapi data yang belum lengkap/sesuai.</p>
	1.3.5 Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	a. Petugas Pemetaan b. Responden	<p>Nilai 6,98. Nilai terlalu besar. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa factor. Petugas menginput tidak memerifikasi dan validasi dari responde.</p> <p>Responden mengisi jawaban dengan tidak objektif,dan terlalu banyak menjawab sangat ideal dan tidak sesuai fakta.</p>	<p>Operator / pengawas agar melakukan verifikasi dan validasi data.</p> <p>Responden agar memperbaiki / melengkapi data yang belum lengkap/sesuai.</p>
2	STANDAR KOMPETENSI ISI			
	1.2 Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan			

	2.2.2 Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	a. Petugas Pemetaan b. Responden	<p>Nilai 6,99. Nilai terlalu besar. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa factor. Petugas menginput data salah, karena data yang diinput terlalu banyak.</p> <p>Responden mengisi jaaban dengan tidak objektif,dan terlalu banyak menjawab sangat ideal dan tidak sesuai fakta.</p>	<p>Operator harus melakukan validasi data</p> <p>Guru harus mengisi data dengan lengkap dan benar</p>
3	STANDAR KOMPETENSI PROSES	-	-	-
	3.2 Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat			
	3.2.9 Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	a. Petugas Pemetaan b. Responden	<p>Nilai 6,93. Nilai terlalu besar. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa factor. Petugas menginput data salah, karena data yang diinput terlalu banyak.</p> <p>Responden mengisi jaaban dengan tidak objektif,dan terlalu banyak menjawab sangat ideal dan tidak sesuai fakta.</p>	<p>Operator harus melakukan validasi data</p> <p>Guru harus mengisi data dengan lengkap dan benar</p>
4	STANDAR KOMPETENSI PENILAIAN			
	4.3 Penilaian pendidikan ditindaklanjuti			

	4.3.1 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	a. Petugas Pemetaan b. Responden	<p>Nilai standar Kompetensi Lulusan 6,79. Padahal bagi kalangan guru penguasaan penilaian sesuai standar masih sering dikeluhkan.</p> <p>Petugas menginput data salah, karena data yang diinput terlalu banyak.</p> <p>Responden mengisi jaaban dengan tidak objektif, dan terlalu banyak menjawab sangat ideal dan tidak sesuai fakta.</p>	<p>Operator harus melakukan validasi data</p> <p>Guru harus mengisi data dengan lengkap dan benar</p>
5	GTK 5.1. Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan			
	5.1.3 Tersedia untuk tiap mata pelajaran	a. Petugas Pemetaan b. Responden	<p>Nilai 0, disebabkan oleh operator yang tidak sempat melakukan validasi data kerana banyaknya tugas dan waktu input dan validasi yang singkat</p> <p>Guru tidak mengisi instrument atau tidak lengkap mengisi data.</p>	<p>Operator harus melakukan validasi data</p> <p>Guru harus mengisi data dengan lengkap dan benar</p>
	5.1.6 Berkompetensi kepribadian minimal baik	a. Petugas Pemetaan b. Responden	<p>Nilai na (not available), Tidak mengisi data karena kekurangan dalam menafsirkan indicator/ subindikator</p>	<p>Lengkapi instrument dengan butir yang relevan.</p>
	5.1.8 Berkompetensi sosial minimal baik	a. Petugas Pemetaan b. Responden	<p>Nilai 0, disebabkan oleh operator yang tidak sempat melakukan validasi data kerana banyaknya tugas dan waktu input dan validasi yang singkat</p> <p>Guru tidak mengisi instrument atau tidak lengkap mengisi data.</p>	<p>Operator harus melakukan validasi data</p> <p>Guru harus mengisi data dengan lengkap dan benar</p>

	<p>5.3 Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan</p>			
	<p>5.3.3 Memiliki kepala tenaga administrasi bersertifikat 5.3.6 Berkompetensi kepribadian minimal baik 5.3.7 Berkompetensi sosial minimal baik 5.3.8 Berkompetensi Teknis minimal baik 5.3.9 Berkompetensi manajerial minimal baik</p>		<p>Nilai na, disebabkan oleh operator yang tidak menginput data dan/ atau validasi data kerana banyaknya tugas dan waktu input dan validasi yang singkat</p> <p>KTA tidak mengisi instrument atau tidak lengkap mengisi data.</p>	<p>Operator harus menginput data/ melakukan validasi data</p> <p>KTA harus mengisi data dengan lengkap dan benar</p>
	<p>5.4 Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan</p>			

	<p>5.4.3 Memiliki kepala tenaga laboratorium bersertifikat</p> <p>5.4.6 Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan</p> <p>5.4.8 Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan</p> <p>5.4.9 Berkompetensi kepribadian minimal baik</p> <p>5.4.10 Berkompetensi sosial minimal baik</p> <p>5.4.11 Berkompetensi manajerial minimal baik</p> <p>5.4.12 Berkompetensi professional minimal baik</p>	<p>a. Petugas pemetaan</p> <p>b. Responden</p>	<p>Nilai na, karena petugas tidak input data</p> <p>responden tidak mengisi instrumen</p>	<p>Input data dengan lengkap dan benar</p> <p>Mengisi data dengan lengkap dan benar</p>
	<p>5.5 Ketersediaan dan kompetensi pustaka sesuai ketentuan</p>			

	<p>5.5.3 Memiliki kepala tenaga pustakawan bersertifikat.</p> <p>5.5.7 Berkompetensi manajerial minimal baik</p> <p>5.5.8 Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik</p> <p>5.5.9 Berkompetensi kependidikan minimal baik</p> <p>5.5.10 Berkompetensi kepribadian minimal baik</p> <p>5.5.11 Berkompetensi sosial minimal baik</p> <p>5.5.12 Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik</p>	<p>a. Petugas pemetaan</p> <p>b. Responden</p>	<p>Nilai na, karena petugas tidak input data</p> <p>responden tidak mengisi instrumen</p>	<p>Input data dengan lengkap dan benar</p> <p>Mengisi data dengan lengkap dan benar</p>
6	SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN			
	6.1 Kapasitas daya tampung sekolah memadai			

	6.1.1 Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	a. Petugas pemetaan b. Responden	Nilai na, karena petugas tidak input data, sarana dan prasarana yang terdapat dalam ruangan belum sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 24 tahun 2007. responden tidak mengisi instrumen	Input data dengan lengkap dan benar Mengisi data dengan lengkap dan benar
	6.2 Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak.			
	6.2.4 Memiliki tempat bermain/ lapangan sesuai standar	a. Petugas pemetaan b. Responden	Nilai 0,07. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Petugas tidak input data dengan lengkap responden tidak mengisi instrumen	Input data dengan lengkap dan benar Mengisi data dengan lengkap dan benar
	6.2.12 Kondisi ruang perpustakaan layak pakai	a. Petugas pemetaan b. Responden	Nilai 0. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Petugas tidak input data dengan lengkap responden tidak mengisi instrumen	Input data dengan lengkap dan benar Mengisi data dengan lengkap dan benar
	6.3 Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak			

	6.3.7 Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar 6.3.19 Kondisi gudang layak pakai	a. Petugas pemetaan b. Responden	Nilai na, karena petugas tidak input data responden tidak mengisi instrumen	Input data dengan lengkap dan benar Mengisi data dengan lengkap dan benar
	6.3.22 Kondisi ruang konseling layak pakai	a. Petugas pemetaan b. Responden	Nilai 0. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan disebabkan oleh beberapa hal: Petugas tidak input data dengan lengkap karena kurang memahami instrumen responden tidak mengisi instrument dengan benar dan lengkap sesuai tagihan.	Input data dengan lengkap dan benar Mengisi data dengan lengkap dan benar
7	STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	Data tidak mendukung analisis.	-
8	PEMBIAYAAN			
	8.3 Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik			
	8.3.1 Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/ APBN/Yayasan/ Sumber lainnya	a. Petugas pemetaan	Nilai 0,13. mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Petugas belum input dana yang berasal dari APBD/ APBN/Yayasan/ Sumber lainnya dengan lengkap	Petugas pemetaan Input data dengan lengkap dan benar

K. Verifikasi Dan Validasi Data Mutu Pendidikan

Hasil verifikasi dan validasi data mutu Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018 dapat disajikan seperti tabel 3.15 di bawah ini.

Tabel.3.15 Verifikasi dan Validasi Data Mutu Jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018

No	STANDAR	DATA YANG BELUM VALID	SOLUSI
1	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1.2 Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan.	-
		1.2.1 Memiliki pengetahuan faktual, prosuderal, konseptual, metakognitif (5,59)	Membuat program pelatihan peningkatan kompetensi pada mapel yang diampu melalui PKB.
2	STANDAR ISI	2.1 Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	-
		2.1.5 Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran. (4,45)	Membuat pelatihan tentang anlaisis SK-KD-Materi Pembelajaran melalui program Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
3	STANDAR PROSES	3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	-
		3.3.1. Melakukan penilaian otentik secara komprehensif (5,95)	Membuat pelatihan tentang penilaian otentik secara komprehensif
4	STANDAR PENILAIAN	4.5 Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	-
		4.5.3 Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai (3,76)	Mengadakan pelatihan penigkatan kompetensi guru dalam pengembangan penilaian dan penentuan kelulusan siswa.
5	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.1. Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan.(3,47)	

	5.1.3 Tersedia untuk tiap mata pelajaran (0)	1. Perekrutan guru disesuaikan kebutuhan tiap mata pelajaran. 2. Penyebaran guru secara proporsional	
	5.1.6 Berkompetensi kepribadian minimal baik (na)	Dinas memfasilitasi kegiatan guru dalam meningkatkan kompetensi kepribadian, seperti kegiatan guru pembelajar melalui MGMP.	
	5.1.8 Berkompetensi sosial minimal baik (0)	Dinas memfasilitasi kegiatan guru dalam meningkatkan kompetensi sosial, seperti kegiatan guru pembelajar melalui MGMP.	
	5.2 Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	Penguatan kompetensi kepala sekolah.	
	5.2.7 Berkompetensi kepribadian minimal baik (3,42)		
	5.2.8 Berkompetensi manajerial minimal baik (3,60)		
	5.2.9 Berkompetensi keirausahaan minimal baik (3,62)		
	5.2.10 Berkompetensi supervisi minimal baik (2,79)		
	5.2.11 Berkompetensi sosial minimal baik (3,70)		
	5.3 Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan		1. Mengadaan diklat penguatan KTA 2. Melakukan seleksi KTA sesuai dengan ketentuan.
	5.3.1 Tersedia kepala tenaga administrasi (0,39)		
	5.3.2 Memiliki kepala tenaga administrasi bersertifikat minimal SMK/ sederajat (0,13)		
	5.3.3 Memiliki kepala tenaga administrasi bersertifikat (na)		
	5.3.6 Berkompetensi kepribadian minimal baik (na)		
	5.3.7 Berkompetensi sosial minimal baik (na)		
	5.3.8 Berkompetensi Teknis minimal baik (na)		
	5.3.9 Berkompetensi manajerial minimal baik (na)		

		<p>5.4 Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan</p> <p>5.4.1 Tersedia kepala tenaga laboratorium (0,28)</p> <p>5.4.2 Tersedia kepala tenaga laboratorium berkualifikasi sesuai (3,43)</p> <p>5.4.3 Memiliki kepala tenaga laboratorium bersertifikat (na)</p> <p>5.4.4 Tersedia tenaga tenaga laboratorium berkualifikasi yang sesuai (0)</p> <p>5.4.5 Tersedia tenaga teknisi laboran (0)</p> <p>5.4.6 Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan (na)</p> <p>5.4.7 Tersedia tenaga laboran (1,18)</p> <p>5.4.8 Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan (na)</p> <p>5.4.9 Berkompetensi kepribadian minimal baik. (na)</p> <p>5.4.10 Berkompetensi sosial minimal baik (na)</p> <p>5.4.11 Berkompetensi manajerial minimal baik. (na)</p> <p>1.1.12 Berkompetensi professional minimal baik. (na)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadaan diklat penguatan kompetensi kepala tenaga laboratorium 2. Melakukan seleksi KT laboratorium sesuai dengan ketentuan.
		<p>5.5 Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan</p> <p>5.5.2 Memiliki kepala tenaga pustakawan berkualifikasi sesuai. (3,69)</p> <p>5.5.3 Memiliki kepala tenaga pustakawan bersertifikat. (na)</p> <p>5.5.4 Memiliki kepala tenaga pustakawan berpengalaman sesuai. (2,24)</p> <p>5.5.5 Tersedia tenaga pustakawan (0)</p> <p>5.5.6 Memiliki kepala tenaga pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan. (1,84)</p> <p>5.5.7 Berkompetensi manajerial minimal baik. (na)</p> <p>5.5.8 Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik. (na)</p> <p>5.5.9 Berkompetensi kependidikan minimal baik. (na)</p> <p>5.5.10 Berkompetensi kepribadian minimal baik. (na)</p> <p>5.5.11 Berkompetensi sosial minimal baik. (na)</p> <p>5.5.12 Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik. (na)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadaan diklat penguatan kompetensi pustakawan 2. Melakukan seleksi pustakawan sesuai dengan ketentuan.

6	SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	6.1 Kapasitas daya tampung sekolah memadai.	<p>1. Memenuhi Kapasitas daya tampung yang memadai</p> <p>2. Memenuhi sarana dan prasarana yang lengkap dan layak</p> <p>3. Memenuhi sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak</p>
		6.1.1 Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai (N/A).	
		6.1.4 Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa (3.05).	
		1.1.6 Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan (1.7).	
		1.1 Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak.	
		6.2.2 Memiliki Lab. IPA sesuai standar (2.12)	
		6.2.3 Memiliki R. Perpustakaan sesuai standar (2.92)	
		6.2.4 Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar (0.07)	
		6.2.11 Kondisi Lab IPA layak pakai (2.02)	
6.2.12 Kondisi ruang perpustakaan layak pakai (0)			
1.2 Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	<p>1. Memenuhi Kapasitas daya tampung yang memadai</p> <p>2. Memenuhi sarana dan prasarana yang lengkap dan layak</p> <p>3. Memenuhi sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak</p>		
6.3.1 Memiliki ruang pimpinan sesuai standar (2.17)			
6.3.2 Memiliki ruang guru sesuai standar (0.41)			
6.3.3 Memiliki ruang UKS sesuai standar (1.32)			
6.3.4 Memiliki tempat ibadah sesuai standar (0.26)			
6.3.5 Memiliki jamban sesuai standar (3.76)			
6.3.7 Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar			
6.3.19 Kondisi gudang layak pakai			
6.3.22 Kondisi ruang konseling layak pakai			

7	STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN	7.3 Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	
		7.3.1 Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik (NA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan penguatan kompetensi kepala sekolah 2. Mengadakan diklat calon kepala sekolah sesuai dengan standar
		7.3.3 Mengembangkan sekolah dengan baik (0)	Mengoptimalkan peran MKKS
		7.3.5 Berjiwa kewirausahaan (0)	Mengoptimalkan peran MKKS
		7.3.6 Melakukan supervisi dengan baik (0)	Melaksanakan supervisi secara berkala serta tindak lanjutnya
8	PEMBIAYAAN	8.3 Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik (4,16)	
		8.3.1 Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/Sumber lainnya (0,13)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat bagi bendahara dalam pengadministrasian keuangan 2. Mengoptimalkan money dari pihak terkait.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis identifikasi masalah dan verifikasi dan validasi data mutu jenjang SMP kabupaten Badung tahun 2018 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Hasil identifikasi masalah dalam penyusunan peta mutu jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018 terdapat nilai-nilai capaian mutu yang anomaly seperti nilai tidak ada (na), nilai 0, dan nilai yang terlalu tinggi / ideal (7). Hal ini disebabkan oleh tiga factor penyebab yaitu (1) system pemetaan, (2) petugas pemetaan, dan (3) responden.
2. Hasil analisis verifikasi dan validasi raport peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Badung Tahun 2018 diketahui bahwa ada 6 (enam) nilai standar yang mengalami peningkatan yaitu standar kelulusan, isi, proses, penilaian, pengelolaan, pembiayaan, tetapi masih terdapat 2 (dua) nilai standar yang justru mengalami penurunan, yaitu pada standar pendidik dan tenaga kependidikan dan sarana dan prasarana.
3. Hasil analisis terhadap kekuatan dan kelemahan terhadap standar, indicator, dan sub indicator dapat direkomendasi program-program untuk meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Badung.

B. Rekomendasi

Mengacu pada pembahasan dan simpulan di atas dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut.

1. Pada standar kelulusan, perlu program pembuatan program pelatihan peningkatan kompetensi pada mapel yang diampu melalui PKB.
2. Pada standar isi, perlu membuat pelatihan tentang penilaian otentik melalui program Keprofesional Berkelanjutan (PKB)
3. Pada standar proses, perlu membuat pelatihan tentang penilaian otentik secara komprehensif.
4. Pada standar penilaian, perlu mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan penilaian dan penentuan kelulusan siswa.
5. Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, perlu diklat peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.
6. Pada standar sarana dan prasarana, perlu dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak
7. Pada standar pengelolaan, perlu dilakukan perekrutan dan penguatan kepala sekolah serta mengoptimalkan dan memfasilitasi kegiatan MKKS sebagai wadah pengembangan profesi kepala sekolah..
8. Pada standar pembiayaan, perlu melaksanakan diklat bagi bendahara dalam pengadministrasian keuangan dan mengoptimalkan moneyv dari pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Denim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung : Pustaka Setia Djaali. 2014. Psikologi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara
- <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/v2/index.php?d=1> (diunduh tanggal 12 Juni 2019)
- Kemdikbud. 2017. Indikator Mutu. Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.
- Kemdikbud. 2018. Perangkat Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Tingkat Sekolah Dasar. Jakarta
- Kemdikbud. 2018. Himpunan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2018. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan